**PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora**
**Vol.5, No.2, Februari 2026**

# Pancasila di Era Globalisasi, Tantangan, dan Relevansi sebagai Dasar Negara

**Luthfia Amalia Mulyadi[1], Renita Rudiana[2], Siti Nur Azizah[3], Zaenul Slam[4]**
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: luthfiaam26@gmail.com[1], renitarudiana77@gmail.com[2], sitinurazizah12345778@gmail.com[3], zaenul_slam@uinjkt.ac.id[4]

**Article History:**
Received: 19 Desember 2025
Revised: 19 Januari 2026
Accepted: 22 Januari 2026

**Keywords:** *Pancasila, Globalisasi, Dasar Negara*

***Abstract:*** *Pancasila berfungsi dan tetap kuat sebagai dasar negara dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan bangsa kita. Indonesia melihat dua sisi globalisasi: liberalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan arus informasi yang melintasi batas negara. Kedua aspek ini membawa peluang dan risiko bagi Indonesia. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan inovasi, kemajuan digital, dan integrasi ekonomi global; namun, di sisi lain, ia juga menyebabkan ketidakadilan digital, kesenjangan sosial-ekonomi, individualisme yang lebih besar, dan penurunan semangat gotong-royong, yang menunjukkan bahwa sila Kelima belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, memasuki budaya negara lain dan menyebarkan ideologi yang tidak toleran melalui media digital membahayakan persatuan. Untuk menyelidiki literatur ilmiah yang berkaitan dengan Pancasila, globalisasi, dan keadilan sosial, artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan sebagai filter ideologis dan kompas moral dalam menangani efek buruk globalisasi. Pancasila meminta negara menjalankan perannya sebagai negara kesejahteraan, memperkuat pemerataan pembangunan, menjaga identitas bangsa, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pancasila berfungsi sebagai pedoman strategis bagi Indonesia untuk mempertahankan kebebasan dan keadilan di era global.*

## PENDAHULUAN

Sebagai ideologi fundamental dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang berakar pada kepribadian rakyat (Antari & De Liska, 2020). Kelima silanya berfungsi sebagai kompas moral dan filosofis untuk mencapai cita-cita kemerdekaan: masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Namun, dalam era globalisasi abad kedua puluh satu, Pancasila telah diuji lagi oleh berbagai masalah yang mengancam dasar kebangsaan, termasuk tantangan struktural, ekonomi, dan kultural.

Tantangan terbesar adalah ketidaksesuaian antara prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima) dan kenyataan bahwa ada perbedaan yang semakin meningkat

(Manalu dkk., 2024). Dengan doktrin liberalisasi ekonomi dan fundamentalisme pasar, globalisasi cenderung memfokuskan kekayaan dan kesempatan pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan dan keterpinggiran (Juliswara & Muryanto, 2022; Wijayanto, 2022). Ketidaksamaan ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyebar ke bidang digital, seperti pendidikan dan kesehatan, menciptakan ketidakadilan baru yang bersifat struktural dan mengancam prinsip pemerataan.

Artikel ini ditulis sebagai tanggapan atas situasi ini dan bertujuan untuk menekankan kembali pentingnya Pancasila sebagai pedoman strategis. Tulisan ini akan menyelidiki literatur untuk memeriksa tiga masalah penting. Pertama, bagaimana implementasi Sila Kelima diancam langsung oleh kesenjangan digital dan sosial. Kedua, seberapa besar Pancasila dapat berfungsi sebagai filter ideologis terhadap dampak kapitalisme global melalui konsep Sistem Ekonomi Pancasila dan mandat negara kesejahteraan. Ketiga, bagaimana masuknya nilai materialisme dan individualisme mengikis semangat gotong royong nasional. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk upaya kolektif untuk mencapai keadilan sosial di tengah persaingan globalisasi.

## METODE PENELITIAN

Relevansi Pancasila sebagai dasar negara dalam menangani tantangan globalisasi, khususnya terkait keadilan sosial, dinilai dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi kajian pustaka *(library research)* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kajian pustaka memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap diskursus akademis yang telah ada, menentukan posisi penelitian ini dalam peta keilmuan, dan metode ini dipilih karena sifat penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan membangun argumentasi konseptual berdasarkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji (Haryono dkk., 2024).

Data dan bahan analisis hanya diperoleh dari sumber sekunder yang terpublikasi dan terbukti kredibel. Sumber utama termasuk jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademis, laporan penelitian dari lembaga terkait, dan dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan tiga fokus utama: 1) filsafat, interpretasi, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima; 2) dinamika, karakteristik, dan konsekuensi multidimensional globalisasi; dan 3) masalah kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, ketimpangan digital, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta Sumber dipilih secara purposif berdasarkan aktualitas, relevansi tematik, dan kedalaman analisis.

Analisis data dilakukan dengan cara yang sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, di mana kutipan, ide, dan temuan penting dari setiap sumber dicatat dan dikomposisikan. Selanjutnya, tahap penelaahan dan interpretasi, di mana data yang dikumpulkan dibaca secara kritis, dibandingkan, dan dihubungkan untuk menemukan pola, kontradiksi, dan variasi dalam pembicaraan saat ini. Tahap terakhir adalah analisis kritis, di mana penelitian tidak hanya menjelaskan situasi, tetapi juga berusaha menawarkan pembacaan kritis tentang bagaimana ideologi Pancasila, tekanan globalisasi, dan praktik keadilan sosial berhubungan satu sama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam era globalisasi, ada konflik yang tajam antara integrasi dan peluang (Widyatama & Hamzah, 2025). Di sisi lain, ini menyebabkan perpecahan sosial dan ketidaksamaan dalam

kekayaan yang mengancam stabilitas negara. Ketidakadilan dan kesenjangan saat ini bukan lagi hanya masalah ekonomi; mereka sekarang menjadi masalah ideologis yang menguji kekuatan dan ketahanan Pancasila sebagai dasar negara (Tamba dkk., 2024). Sistem ekonomi yang lebih liberal dan kompetitif diadopsi sebagai akibat dari globalisasi (Simanjorang dkk., 2023). Meskipun model ini sering dianggap efektif untuk mendorong pertumbuhan total, ia sering mengabaikan elemen pemerataan, yang merupakan inti dari prinsip-prinsip Pancasila. Dua fenomena utama menunjukkan pengaruh paradigma ini. Pertama, konsentrasi modal dan investasi terjadi, dengan bisnis multinasional dan investasi asing langsung cenderung berpusat di daerah yang telah maju, seperti sebagian besar Jawa dan Sumatra. Ini secara sistematis memperlebar jarak pembangunan dengan wilayah Indonesia Timur, menyebabkan ketidakadilan pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut. Kedua, ada perbedaan nilai antara prinsip gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan dasar solidaritas sosial-ekonomi dalam Pancasila, dan individualisme ekstrim yang dibawa oleh budaya-budaya global.

Secara filosofis, gagasan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dipromosikan oleh para pendiri bangsa, terutama Soekarno, berakar pada tujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kemiskinan dan kelas, serta menghindari semua bentuk penindasan. Visi ini menekankan mandat konstitusional bahwa kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Tetapi kenyataan di era globalisasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini telah menyimpang jauh. Diskriminasi, kemiskinan, dan perlakuan tidak adil masih menjadi masalah besar yang menunjukkan bahwa Sila Kelima masih belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan ekonomi dan sosial nasional (Sulaiman dkk., 2025). Tradisi The Winner Takes All, di mana sebagian kecil orang menguasai sebagian besar sumber daya, semakin terlihat di ekonomi dunia. Ini bertentangan dengan Sila Kelima.

Ketimpangan digital, jenis ketidakadilan struktural baru yang dihasilkan oleh globalisasi (Nurrohim dkk., 2024). Di era yang sangat terhubung ini, keadilan sosial menuntut penerapan Sila Kelima secara tegas untuk memastikan akses internet dan teknologi merata di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota. Kemajuan teknologi justru berpotensi menjadi alat yang memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi jika tidak digunakan secara sadar dan sistematis (Lestari dkk., 2025). Kesenjangan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga telah menyebar ke ranah kultural lain. Nilai-nilai materialisme dan individualisme global telah menyebabkan krisis moral yang menghancurkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong, yang merupakan fondasi moral dari Keadilan Sosial itu sendiri.

Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral dan filter ideologis meskipun menghadapi tantangan multidimensi ini. Indonesia harus secara konsisten mengembalikan dan mengaktualisasikan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) jika mereka ingin memperbaiki ketidakadilan yang disebabkan oleh fundamentalisme pasar global. SEP menekankan pembentukan koperasi dan komitmen pada pemerataan, dan bertindak sebagai antitesis langsung terhadap persaingan bebas ekstrim. Tujuan dari SEP adalah untuk menciptakan keadilan distributif dan menghilangkan akibat buruk dari kapitalisme global (Bawazier, 2017). Selain itu, Pancasila mendorong negara untuk berperan aktif sebagai negara kesejahteraan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan memastikan bahwa keuntungan globalisasi didistribusikan secara adil, sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial.

Terakhir, dengan globalisasi digital, yang secara khusus menyasar generasi muda, mempertahankan relevansi Pancasila semakin sulit. Pengaruh ini menimbulkan masalah modernisasi yang dapat mengancam prinsip-prinsip asli Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus dilindungi dan dipertahankan di era modern melalui pendekatan multisektoral, termasuk

pendekatan budaya, penegakan hukum, pendidikan karakter yang efektif, dan penguatan organisasi dan kegiatan yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Internalisasi nilai-nilai ini sangat penting agar Pancasila tetap relevan sebagai panduan hidup bagi generasi muda dan sebagai tameng ideologis bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan dunia (Nafiah & Slam, 2024).

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara dan logika globalisasi yang berfokus pada pasar. Dengan mendorong ekonomi yang liberal dan kompetitif, globalisasi telah menyebabkan ketidakseimbangan struktural seperti stagnasi pembangunan dan peningkatan konsentrasi modal. Tidak hanya fenomena ini memperlebar perbedaan ekonomi antara bagian barat dan timur Indonesia, tetapi juga menyebabkan pergeseran nilai. Etos kekeluargaan dan gotong royong, yang merupakan dasar kohesi sosial bangsa, secara bertahap dirusak oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme yang menyertainya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar masalah ekonomi teknis; sekarang itu adalah ujian ideologis tentang kapasitas Pancasila sebagai dasar negara untuk mengarahkan dinamika dunia ke arah keadilan universal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontradiksi semakin diperdalam seiring dengan munculnya bentuk ketidakadilan baru di era digital. Meskipun filosofi Sila Kelima menyatakan bahwa mandat konstitusional adalah untuk memanfaatkan kekayaan negara untuk kemakmuran bersama, kenyataannya menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi, yang merupakan sarana partisipasi dan produksi di era modern, masih sangat terbatas. Salah satu konsekuensi dari kesalahan digital ini adalah kemungkinan mereka akan memperkuat ketidakadilan yang sudah ada dan menghasilkan lingkaran setan di mana kelompok yang paling kaya semakin menguntungkan. Ini menunjukkan kegagalan distribusi yang sistemik, di mana prinsip The Winner Takes All menjadi prinsip utama dalam ekonomi global. Akibatnya, penerapan Sila Kelima dalam kebijakan nyata masih jauh dari ideal. Krisis ini memiliki banyak aspek, seperti kehilangan sumber daya, kehilangan akses, dan, yang paling penting, kehilangan nilai-nilai, yang merupakan dasar moral bangsa.

Penelitian menunjukkan bahwa Pancasila semakin relevan sebagai filter ideologis dan kompas moral dalam menghadapi kompleksitas masalah ini. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) dianggap sebagai dasar antitesis yang penting untuk memerangi ekstremisme pasar. Dengan menekankan prinsip kekeluargaan, koperasi, dan pemerataan, SEP memberikan landasan filosofis dan praktis bagi negara untuk bertindak lebih intervensionis sebagai negara kesejahteraan. Untuk membagi keuntungan globalisasi secara adil dan melindungi masyarakat dari efek eksploitatifnya, negara harus berpartisipasi secara aktif. Selain itu, upaya strategis harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi generasi muda di tengah gempuran budaya digital global. Pancasila dapat tetap berfungsi sebagai tameng ideologis dan pedoman hidup yang dinamis, memastikan kedaulatan dan keadilan sosial di tengah arus globalisasi yang tak terhindarkan. Ini dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

## KESIMPULAN

Kapasitas Pancasila untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia di tengah tantangan globalisasi menunjukkan relevansi dan ketahanan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan segala paradoksnya, globalisasi telah meningkatkan disparitas ekonomi, menciptakan ketimpangan digital yang baru, dan menghancurkan nilai-nilai gotong royong.

Semua ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap prinsip persatuan dan kesejahteraan umum. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Pancasila harus direaktualisasi bukan hanya sebagai slogan, tetapi juga sebagai garis besar tindakan yang nyata. Ini membutuhkan rekonstruksi filosofis yang berfokus pada keadilan distributif sebagai inti dari Sila Kelima; penerapan kebijakan ekonomi yang bersandar pada prinsip Sistem Ekonomi Pancasila; dan peran negara sebagai kemakmuran negara untuk mengoreksi ketidakadilan struktural. Selain itu, diperlukan strategi pendidikan dan kebudayaan yang dapat melindungi identitas bangsa dari kehancuran nilai. Oleh karena itu, Pancasila masih merupakan pedoman strategis yang tidak tergantikan bagi Indonesia untuk memanfaatkan globalisasi secara kritis, berdaulat, dan berkeadilan. Kemajuan yang dicapai harus benar-benar inklusif dan sesuai dengan jati diri bangsa.

## DAFTAR REFERENSI

Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi nilai nilai pancasila dalam penguatan karakter bangsa. *Widyadari*, *21*(2), 676-687.

Bawazier, F. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional*, *3*(2), 233-252.

Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, *14*(1).

Juliswara, V., & Muryanto, F. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-nilai Positif Globalisasi bagi Kemajuan Bangsa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., & Safitri, S. (2025). Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Pendidikan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *3*(4), 01-16.

Manalu, I. A., Lubis, U. U., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(6), 5308-5316.

Nafiah, F. N. A., & Slam, Z. (2024). Meningkatkan Ketahanan Nasional Dengan Geostrategi Di Indonesia. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, *19*(2), 66-80.

Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, *1*(3), 1-7.

Simanjorang, F., Fattahillah, A., Irfan, D. S., Firjatullah, G., Pangaribuan, I. M., & Baga, M. (2023). Globalisasi Dan Lingkungan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Analisis Tentang Dampak Dan Tren. *Jurnal Riset Manajemen*, *1*(2), 30-40.

Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima. *Dame Journal of Law*, *1*(1), 25-44.

Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *4*(2), 146-162.

Widyatama, P. R., & Hamzah, M. R. (2025). Motivasi dan Tantangan Mahasiswa dalam Berwirausaha: Perspektif Generasi Muda di Era. *Journal Of Economic Research*, *1*(2), 58-69.

Wijayanto, W. (2022). *Era Globalisasi Sejarah dan Perkembangan*. CV Media Edukasi Creative.